

**PENGARUH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KEMANDIRIAN
WANITA DI KECAMATAN CIMENYAN
KABUPATEN BANDUNG**

ABSTRAK

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidak mampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. kemiskinan dapat juga dikatakan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin. (<https://sarulmardianto.wordpress.com>)

Kemiskinan dapat ditandai dengan adanya pengangguran, keterbelakangan dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional serta tidak dapat ditunda penanggulangannya. Adapun tujuan dari Bidang Usaha Ekonomi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah pemberian bantuan stimulan untuk menunjang masyarakat yang kurang beruntung, guna peningkatan ekonomi pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Pemberdayaan ekonomi rakyat di sini merupakan upaya dalam mendorong perubahan struktural masyarakat dengan memperkuat kedudukan serta peran ekonomi rakyat dalam perekonomian. Pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui 3 (tiga) jalur, yaitu: Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*Enabling*), Menguatkan potensi dan daya yang dimiliki masyarakat (*Empowering*), Memberikan perlindungan (*Protecting*). Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mewujudkan kemandirian dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan serta keterbelakangan. (Dwi Pratiwi Kurniawati, 2013)

Persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 10,19 persen, meningkat 0,41 persen poin terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen poin terhadap September 2019. Jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2020 sebesar 7,38 persen, naik menjadi 7,88 persen pada September 2020. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2020 sebesar 12,82 persen, naik menjadi 13,20 persen pada September 2020. Dibanding Maret 2020, jumlah penduduk miskin September 2020 perkotaan naik sebanyak 876,5 ribu orang (dari 11,16 juta orang pada Maret 2020 menjadi 12,04 juta orang pada September 2020). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan naik sebanyak 249,1 ribu orang (dari 15,26 juta orang pada Maret 2020 menjadi 15,51 juta orang pada September 2020). Garis Kemiskinan pada September 2020 tercatat sebesar Rp458.947,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp339.004,- (73,87 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan

Makanan sebesar Rp119.943,- (26,13 persen). Pada September 2020, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,83 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.216.714,-/rumah tangga miskin/bulan.(<https://www.bps.go.id>)

Dapat disimpulkan bahwa masalah kesejahteraan sosial diharapkan dapat terpecahkan melalui pemberian dasar-dasar pengetahuan yang dapat dijangkau oleh penerima pelayanan sosial yang dianggap penting, untuk keberhasilan dirinya dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan dengan mempelajari berbagai macam keterampilan tertentu. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat dan atau kebutuhannya, berpartisipasi, berorganisasi, memperngaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakat secara bertanggung-gugat demi perbaikan kehidupannya. Adapun pengertian pemberdayaan masyarakat menurut Huraerah (2008:87) sebagai berikut:

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki.

Pemberdayaan masyarakat dikatakan sebagai serangkaian proses yang menghasilkan masyarakat yang mampu ikut melibatkan diri, dapat mengawasi, berpengaruh bagi apapun yang ada di sekitarnya yang membutuhkan peranannya. Semua itu didapatkan apabila masyarakat telah mendapat aktualisasi diri berupa keterampilan, pengetahuan, dan kuasa yang akan memiliki pengaruh bagi diri dan sekitarnya. Dalam upaya pemberdayaan, masyarakat diharapkan mencapai keberfungsian sosial sesuai dengan kapasitasnya agar dapat menjalankan kehidupannya secara mandiri. Lalu definisi kemandirian menurut Sutari Imam Barnadib (1982) yaitu :

perilaku mampu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan/masalah, mempunyai rasa percaya diri dan dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk kebebasan untuk inisiatif, mengatasi hambatan, melakukan dengan tepat, gigih dalam usaha dan melakukan sendiri segala sesuatu tanpa bantuan orang lain, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal agar masyarakat tersebut dapat bertahan dan mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk masyarakat mandiri dan tidak bergantung lagi dari pihak luar.

Kata kunci : Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kemandirian Wanita.

ABSTRACT

Poverty is a condition in which people are unable to meet basic needs such as food, clothing, shelter, education, and health. Poverty can be caused by the scarcity of basic necessities, or the difficulty of accessing education and employment. Some people understand this term subjectively and comparatively, while others see it from a moral and evaluative point of view, and still others understand it from an established scientific point of view. Poverty can also be said as a low standard of living, namely the level of material deficiency in a number or group of people compared to the standard of living generally applicable in the society concerned. This low standard of living directly affects the level of health, moral life, and self-esteem of those who are classified as poor. (<https://sarulmardianto.wordpress.com>)

Poverty can be characterized by unemployment, underdevelopment and powerlessness. Therefore, poverty is a top priority in the implementation of national development and its mitigation cannot be delayed. The purpose of the Economic Business Sector at the Community Empowerment Agency is to provide stimulant assistance to support disadvantaged communities, in order to increase the economy of people's income and reduce poverty. People's economic empowerment here is an effort to encourage structural changes in society by strengthening the position and role of the people's economy in the economy. Community empowerment must be carried out through 3 (three) pathways, namely: Creating a climate that allows community potential to develop (Enabling), Strengthening the potential and power of the community (Empowering), Providing protection (Protecting). Community empowerment is an effort to increase the ability of the community to be able to realize independence and escape from the shackles of poverty and underdevelopment. (Dwi Pratiwi Kurniawati, 2013)

The percentage of poor people in September 2020 was 10.19 percent, an increase of 0.41 percentage points against March 2020 and an increase of 0.97 percentage points against September 2019. The number of poor people in September 2020 was 27.55 million people, an increase of 1.13 million people in March 2020 and an increase of 2.76 million people in September 2019. The percentage of the urban poor in March 2020 was 7.38 percent, increasing to 7.88 percent in September 2020. While the percentage of the rural poor in March 2020 was 12.82 percent, rose to 13.20 percent in September 2020. Compared to March 2020, the number of urban poor in September 2020 increased by 876.5 thousand people (from 11.16 million people in March 2020 to 12.04 million people in September 2020). Meanwhile, in the same period the number of rural poor people increased by 249.1 thousand people (from 15.26 million people in March 2020 to 15.51 million people in September 2020). The Poverty Line in September 2020 was recorded at Rp458,947/capita/month with the composition of the Food Poverty Line of Rp339,004,- (73.87 percent) and the Non-Food Poverty Line of Rp119,943,- (26.13 percent) . In September 2020, on average, poor households in Indonesia had 4.83 household members. Thus, the size of the Poverty Line per poor household on average is IDR 2,216,714,-/poor household/month. (<https://www.bps.go.id>)

It can be concluded that social welfare problems are expected to be solved through the provision of basic knowledge that can be reached by recipients of social services that are considered important for their success in carrying out life tasks by learning certain kinds of skills. Empowerment can be defined as an effort to increase the ability of the community (poor,

marginalized, marginalized) to express their opinions and/or needs, participate, organize, influence and manage community institutions responsibly for the sake of improving their lives. The definition of community empowerment according to Huraerah (2008:87) is as follows:

Community empowerment is a process within the framework of efforts to strengthen what is commonly called community self-reliance or independence. In this process, the community is assisted to make an analysis of the problems they are facing, assisted in finding alternative solutions to these problems, and shown strategies to utilize their various capabilities.

Community empowerment is said to be a series of processes that produce people who are able to get involved, can supervise, have an effect on whatever is around them that needs their role. All that is obtained when the community has received self-actualization in the form of skills, knowledge, and power that will have an influence on themselves and their surroundings. In an effort to empower, the community is expected to achieve social functioning in accordance with their capacity so that they can run their lives independently. Then the definition of independence according to Sutari Imam Barnadib (1982) is:

the behavior of being able to take the initiative, being able to overcome obstacles/problems, having self-confidence and being able to do things on their own without the help of others

Based on the above definition, it can be concluded that community empowerment is an effort that aims at the freedom to take initiative, overcome obstacles, do the right thing, be persistent in business and do everything on their own without the help of others, so that people can realize their identity, dignity and worth. so that the community can survive and be independent both in the economic, social, religious and cultural fields. Thus, it can be said that community empowerment

aims for an independent community and no longer dependent on outside parties.

Keywords: Community Empowerment Against Women's Independence.

ABSTRAK

Kamiskinan mangrupikeun kaayaan di mana jalma-jalma henteu tiasa nyumponan kabutuhan poko sapertos tuangeun, pakéan, panyumputan, pendidikan, sareng kaséhatan. Kamiskinan tiasa disababkeun ku kakurangan kabutuhan poko, atanapi kasusah ngakses pendidikan sareng padamelan. Sababaraha urang ngartos istilah ieu sacara subyektif sareng komparatip, sedengkeun anu sanés ningali éta tina sudut pandang moral sareng évaluatif, sareng anu sanés ngartos éta tina sudut pandang ilmiah anu mantep. Kamiskinan ogé tiasa disebut salaku standar hirup anu handap, nyaéta tingkat kakurangan matéri dina sajumlah atanapi kelompok jalma dibandingkeun sareng standar kahirupan umumna lumaku di masarakat anu bersangkutan. Standar hirup anu handap ieu sacara langsung mangaruhan kana tingkat kaséhatan, kahirupan moral, sareng harga diri jalma-jalma anu diklasifikasikeun janten miskin. (<https://sarulmardianto.wordpress.com>)

Kamiskinan tiasa dicirikeun ku pangangguran, kurang ngembangkeun sareng daya teu upaya. Maka, kamiskinan mangrupikeun prioritas utama dina palaksanaan pangwangunan nasional sareng mitigasina henteu tiasa ditunda. Tujuan tina Séktor Bisnis Ékonomi di Badan Pemberdayaan Komunitas nyaéta nyayogikeun bantosan anu stimulan pikeun ngadukung komunitas anu teu gaduh, pikeun ningkatkeun ékonomi penghasilan masarakat sareng ngirangan kamiskinan. Pemberdayaan ékonomi masarakat di dieu mangrupikeun upaya pikeun ngadorong parobahan struktural di masarakat ku nguatan posisi sareng peran ékonomi rayat dina ékonomi. Pemberdayaan masarakat kedah dilaksanakeun ngalangkungan 3 (tilu) jalur, nyaéta: Nyiptakeun iklim anu ngamungkinkeun poténsial masarakat berkembang (Ngaktipkeun), Nguatkeun poténsi sareng kakuatan masarakat (Pemberdayaan), Nyayogikeun panyalindungan (Ngajagaan). Pemberdayaan masarakat mangrupikeun upaya ningkatkeun kamampuan masarakat pikeun tiasa ngawujudkeun kamerdekaan sareng kabur tina belunggu kamiskinan sareng kamekaran. (Dwi Pratiwi Kurniawati, 2013)

Persentase jalma miskin dina bulan Séptember 2020 nyaéta 10,19 persén, paningkatan 0,41 poin persentase ngalawan Maret 2020 sareng paningkatan 0,97 poin persentase ngalawan Séptember 2019. Jumlah jalma miskin dina bulan Séptember 2020 nyaéta 27,55 juta jalma, kanaékan 1,13 juta jalma dina Maret 2020 sareng paningkatan 2.76 juta jalma dina bulan Séptember 2019. Persentase jalma miskin di kota di Maret 2020 nyaéta 7,38 persén, ningkat kana 7,88 persén dina bulan Séptember 2020. Sedengkeun persentase masarakat miskin désa di Maret 2020 12,82 persén, naros ka 13.20 persén dina bulan Séptember 2020. Dibandingkeun sareng Maret 2020, jumlah penduduk kota miskin di Séptember 2020 ningkat ku 876.5 rébu urang (tina 11,16 juta jalma dina Maret 2020 janten 12,04 juta jalma dina bulan Séptember 2020). Samentara éta, dina période anu sami jumlah jalma miskin di padesaan naék ku 249,1 rébu urang (tina 15,26 juta jalma dina Maret 2020 janten 15,51 juta jalma dina bulan Séptember 2020). Garis Kamiskinan dina Séptember 2020 kacatet dina Rp458.947 / capita / bulan kalayan komposisi Garis Kemiskinan Pangan Rp339,004, - (73,87 persén) sareng Garis Kemiskinan Non-Pangan Rp119.943, - (26,13 persén). Dina Séptember 2020, rata-rata, rumah tangga miskin di Indonésia ngagaduhan 4,83 anggota rumah tangga. Maka, ukuran Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin rata-rata nyaéta IDR 2,216.714, - / rumah tangga miskin / bulan. (<https://www.bps.go.id>)

Éta tiasa dicindekkeun yén masalah karaharjaan sosial dipiharep tiasa direngsekeun ku cara nyayogikeun kanyaho dasar anu tiasa dihontal ku panarima jasa sosial anu dianggap penting

pikeun kasuksésanna dina ngalaksanakeun tugas kahirupan ku diajar sababaraha jinis kaparigelan. Pemberdayaan tiasa didefinisikeun salaku upaya ningkatkeun kamampuan masarakat (miskin, marginalisasi, marginalisasi) pikeun ngutarakeun pendapat sareng / atanapi kabutuhanana, ngiringan, ngatur, mangaruhan sareng ngatur lembaga komunitas kalayan tanggung jawab pikeun ningkatkeun kahirupan. Definisi pemberdayaan masarakat numutkeun Huraerah (2008: 87) nyaéta kieu:

Pemberdayaan masarakat mangrupikeun prosés dina kerangka upaya pikeun nguatkeun naon anu biasa disebut mandiri komunitas atanapi kamandirian. Dina prosés ieu, masarakat dibantuan pikeun nganalisis masalah anu disanghareupan, dibantosan dina milarian solusi alternatif pikeun masalah ieu, sareng nunjukkeun stratégi pikeun ngamangpaatkeun sababaraha kamampuan.

Pemberdayaan komunitas cenah mangrupikeun séri prosés anu ngahasilkeun jalma anu tiasa aub, tiasa ngawas, mangaruhan naon waé anu aya di sakurilingna anu peryogi peranna. Sadaya anu dipikagaduh nalika masarakat parantos nampi aktualisasi diri dina bentuk katerampilan, pangetahuan, sareng kakuatan anu bakal mangaruhan diri sareng lingkunganana. Dina upaya pemberdayaan, masarakat dipiharep tiasa ngahontal fungsi sosial saluyu sareng kamampuanana pikeun ngajalankeun hirupna sacara mandiri. Maka definisi kamerdekaan numutkeun Sutari Imam Barnadib (1982) nyaéta:

tingkah laku tiasa purah, tiasa ngungkulan halangan / masalah, gaduh kayakinan diri sareng tiasa ngalakukeun hal nyalira tanpa dibantuan ku batur

Dumasar kana watesan di luhur, tiasa dicindekkeun yén pemberdayaan masarakat mangrupikeun upaya anu tujuanana kabébasan pikeun milampah inisiatif, ngungkulan halangan, ngalakukeun hal anu leres, pengkuh dina usaha sareng ngalakukeun sadayana nyalira tanpa bantosan batur, maka yén jalma tiasa sadar idéntitasna, harkatna sareng ajénna. jadi masarakat tiasa salamet sareng mandiri boh dina bidang ékonomi, sosial, agama sareng budaya. Maka, tiasa disebatkeun yén pemberdayaan masarakat tujuanna pikeun komunitas mandiri sareng henteu gumantung deui ka pihak luar.

Kata kunci: Pemberdayaan Komunitas Ngalawan Kamerdekaan Awéwé.